

Judul : Program prioritas MBG, BPJH percepat sertifikasi halal
Tanggal : Rabu, 11 Februari 2026
Surat Kabar : Rakyat Merdeka
Halaman : 9

Program Prioritas MBG BPJH Percepat Sertifikasi Halal



Aprozi Alam

ANGGOTA Komisi VIII DPR Aprozi Alam meminta Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) mempercepat sertifikasi halal juru potong ayam dan daging dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG). BPJPH berperan strategis dalam menjamin aspek kehalalan pangan pada program ini.

Sebagai program prioritas Presiden Prabowo Subianto, menurut Aprozi, MBG harus mendapat dukungan penuh dari seluruh pemangku kepentingan, termasuk dalam hal jaminan produk halal. Jaminan itu penting untuk menjaga keamanan, kualitas, dan kepercayaan publik terhadap program-program Pemerintah.

"Karena itu, BPJPH harus hadir dan memberikan dukungan penuh agar MBG berjalan sesuai prinsip kehalalan, keamanan, dan kepercayaan publik," ujar Aprozi dalam keterangannya, Selasa (10/2/2026).

Dia menegaskan, aspek kehalalan tidak bisa dipisahkan dari penyediaan pangan. BPJPH harus memastikan kejelasan dan kepastian halal sejak proses pemotongan hingga makanan siap dikonsumsi penerima manfaat. Untuk itu, perlu langkah konkret, termasuk bersinergi dengan kementerian terkait, penda, dan lembaga keagamaan.

"Untuk memastikan seluruh juru potong ayam dan daging di

dapur MBG tersertifikasi halal," tegas politikus Partai Golkar itu.

Selain itu, Aprozi juga meminta percepatan sertifikasi halal terhadap seluruh produk yang disajikan di dapur MBG. Percepatan itu penting untuk mencegah keraguan publik sekaligus menjaga kredibilitas program prioritas Pemerintah.

"Ini merupakan bagian dari tanggung jawab negara dalam memberikan perlindungan dan kepastian hukum bagi masyarakat," ujarnya.

Aprozi berharap, lewat kerja sama lintas lembaga dan percepatan sertifikasi halal, program MBG dapat berjalan optimal. Program itu juga diharapkan jadi contoh pelaksanaan kebijakan pangan nasional yang berkualitas, aman, halal, dan berkeadilan.

Sejalan dengan itu, Wakil Ketua Komisi VIII DPR Abidin Fikri menilai, perlu penguatan regulasi jaminan produk halal agar kewenangan antar lembaga tidak tumpang tindih. Percepatan pembahasan aturan berperan penting agar sertifikasi halal tidak membingungkan pelaku usaha maupun masyarakat.

"Istilahnya, supaya jangan sampai nanti kita 'beli kain di toko bangunan'. Komisi VIII mendorong agar pembahasan regulasi bisa secepatnya dilakukan," ujar legislator PDIP itu.

Menanggapi hal tersebut, Kepala BPJPH Haikal Hassan menegaskan, pihaknya terus mempercepat sertifikasi halal untuk program MBG lewat pelatihan kepala Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG). Langkah ini dijalankan seiring dengan kebijakan wajib halal yang akan berlaku penuh pada Oktober 2026.

Haikal menjelaskan, strategi percepatan dilakukan dengan menjadikan kepala SPPG sebagai penyelia halal. Mereka bertanggung jawab memastikan seluruh proses penyediaan makanan bergizi berjalan sesuai standar jaminan produk halal. ■ PVB